

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19
BAGI UMKM KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:
Novi Syavitri
181010018

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19
BAGI UMKM KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

**Novi Syavitri
181010018**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Novi Syavitri
NPM : 181010018
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam 01 Agustus 2022



Novi Syavitri

181010018

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19
BAGI UMKM KOTA BATAM**

SKRIPSI

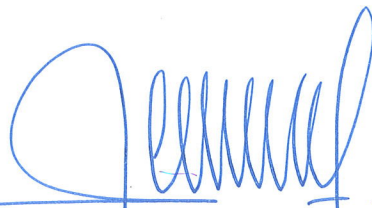
**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

**Novi Syavitri
181010018**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera di bawah ini**

Batam, 01 Agustus 2022



**Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., M.PA.
Pembimbing**



ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat, serta kesempatan kerja yang selama bertahun-tahun telah memegang lebih dari 50 persen kontribusi terhadap PDB Indonesia. Meskipun dikatakan sebagai sektor usaha yang tahan banting dan prospektif, namun nyatanya UMKM tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dibutuhkan peran dari pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi kembali melalui kegiatan UMKM yang sempat melesu akibat terpaan pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam sehingga kegiatan UMKM sehingga dapat pulih serta bangkit kembali ditengah pandemi Covid-19 ataupun pasca pandemi yang terjadi saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berperan sebagai tiga hal yakni sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Dalam ketiga perannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah menjalankan perannya dengan baik. Meski demikian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam. Adapun yang menjadi faktor pendorong diantaranya; (1) ketersediaan sarana dan prasarana, berupa gedung PLUT-KUMKM; (2) ketersediaan anggaran; (3) kemitraan, yakni dilakukannya kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Pt. Telkom, Akademi Melayu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi, Bea Cukai, perbankan, *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), dan Bank Jatim; dan (4) partisipasi dari masyarakat. Sedangkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya; adanya kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); sumber daya yang terbatas; dan tidak lengkapnya dokumen pelaku UMKM.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, UMKM, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are community-based business activities that can increase income and economic equity of the community, as well as employment opportunities that over the years have held more than 50 percent of the contribution to Indonesia's GDP. Although it is said to be a resilient and prospective business sector, in fact, MSMEs cannot be separated from the impact of the Covid-19 pandemic. Through the Department of Cooperatives and micro enterprises, it takes the role of the government in carrying out economic recovery again through MSME activities that have been slowed down due to exposure to the Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to find out how the role of the Cooperative and Microenterprise office in handling the impact of Covid-19 for Batam city MSMEs, so that MSME activities can recover and rise again in the midst of the Covid-19 pandemic or the current post-pandemic. This research used qualitative methods with descriptive approach. In handling the impact of Covid-19 for MSMEs, the Batam City Cooperative and Microenterprise Office plays a role in three things, namely as a regulator, facilitator, and catalyst. In all three roles, the Department of Cooperatives and micro enterprises Batam city has performed its role well. However, there are some factors that affect the Department of Cooperatives and Microenterprises in handling the impact of Covid-19 for Batam city MSMEs. As for the driving factors include; availability of facilities and infrastructure, in the form of building PLUT-KUMKM; availability of budget; partnership, namely cooperation with several parties including Pt. Telkom, Akademi Melayu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi, Customs, Banking, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Persatuan Hotel & Restaurant Indonesia (PHRI), and Bank Jatim; and participation from the community. While some of the things that are inhibiting factors include; the existence of a policy on the implementation of restrictions on community activities; limited resources; and incomplete documents of MSME actors.

Key Word: Role of government, MSMEs, Covid-19 Pandemic.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.
4. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., M.PA. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
5. Segenap Dosen Program Studi Administrasi Negara, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Seluruh anggota dan staff Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yang telah memberikan izin serta bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Syaiful Wardi dan Ibu Sulastri yang selalu mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat kepada penulis.
9. Kedua adik yang penulis kasihi, Nadya Syafitri dan Nadin Syafitri yang selalu membantu penulis untuk mengerjakan hal lain dikala penulis sedang menyusun skripsi.
10. Sahabat Badut yang selalu membantu, memberikan masukan, menyemangati, dan menghibur penulis, Ade Sri, Adjie Syifa, Reni Anjani dan Nursyalinda.
11. Sahabat dan teman seperjuangan Liza Putri, Rahmat Setia, Mahdalena, Kristin Angelina, Laura Kristiani, Gita, Nailil Izza, Muhammad Rasyid, Riski Tri, dan semua teman-teman Administrasi Negara angkatan 2018.
12. Kepada Tawan Vihokratana, Thitipoom Techaapaikun, Atthaphan Phunsawat dan Jumpol Adulkittiporn yang secara tidak langsung selalu menghibur, memotivasi dan memberikan semangat melalui karya-karyanya disaat penulis sedang *down* dan jenuh.

13. *Lofi Music Playlis* yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya bagi kita semua, Amin.

Batam, 01 Agustus 2022



Nowi Syavitri



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	11
2.1 Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	11
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12
2.2.2 UMKM di Kota Batam	16
2.3 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Ketahanan UMKM	17
2.4 Penelitian Terdahulu	24
2.5 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian	35
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian.....	36

3.3.1 Lokasi Penelitian.....	36
3.3.2 Periode Penelitian.....	36
3.4 Sumber Data.....	37
3.4.1 Data Primer	37
3.4.2 Data Sekunder	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	38
3.5.1 Wawancara.....	38
3.5.2 Dokumentasi	39
3.6 Metode Analisis Data	39
BAB IV	41
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	41
4.2 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam	46
4.2.1 Regulator	47
4.2.2 Fasilitator	55
4.2.3 Katalisator	72
4.3 Faktor yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam	78
4.3.1 Faktor Pendukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam	78
4.3.2 Faktor Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam	86
BAB V.....	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020.....	2
Gambar 1.2 Angka PHK di Indonesia tahun 2014-2020	4
Gambar 1.3 Lingkungan bisnis UMKM di Indonesia.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 SOT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PLUT-KUMKM Kota Batam.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Periode Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	38



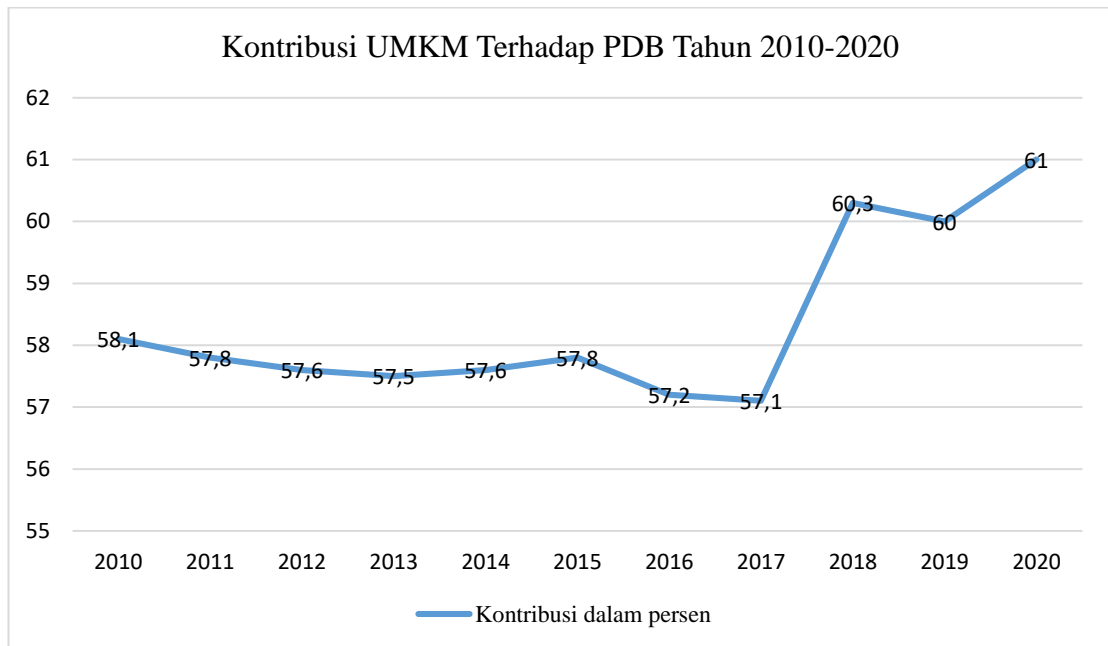
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat diandalkan dalam proses pembangunan nasional dan menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja pemerintah. Pembangunan nasional dilakukan agar masyarakat dapat merubah taraf kehidupannya menuju tingkat yang lebih baik dari sebelumnya (Sarfiyah, 2019). Pembangunan ini harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya, agar pertumbuhan yang diharapkan tidak terpusat melainkan merata dan kokoh. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan nasional, hal ini sangat penting bagi negara untuk mewujudkan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Sarfiyah, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya kenaikan pada Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana kenaikan ini akan menambah pendapatan dan pengeluaran masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan distribusi pendapatan (Indrayanti, 2020). PDB diartikan sebagai seluruh nilai produk dan jasa akhir (*nett*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah (BPS, 2022). Selama bertahun-tahun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang lebih dari 50 persen kontribusi terhadap PDB Indonesia, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia meski tanpa intervensi kebijakan yang signifikan, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian negara tidak bisa disepelekan (Arofah, 2019).



Gambar 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020
(<https://lokadata.beritagar.id>)

UMKM merupakan kegiatan usaha berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat, serta kegiatan usaha yang dapat memperluas dan pemerataan kesempatan kerja (Auliya & Arif, 2021). Pelaku bisnis terutama para pengusaha muda dan pelaku usaha rumahan mendukung dengan baik agar perkembangan UMKM dapat terus berkembang pesat dan mandiri. Untuk mengembangkan kegiatan UMKM, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan tentang penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya Undang-Undang ini, memberikan UMKM landasan hukum yang kuat, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan perekonomian nasional (Marlinah, 2020).

Merebaknya penyebaran virus corona atau Covid-19 pada awal Tahun 2020, memberikan dampak di semua sektor salah satunya pada sektor perekonomian, terutama pada kegiatan UMKM. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan *Coronaviruses* atau Covid-19 sebagai virus yang menyerang saluran pernafasan yang penyebarannya dan penularannya sangat cepat. Dengan demikian, untuk meminimalisir terjadinya penyebaran dan penularan virus ini, diperlukan adanya pembatasan terhadap kegiatan dalam banyak hal. Menurut Muhyiddin (2020), pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini diakibatkan oleh pandemi yang memberikan dampak kepada kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk (Muhyiddin, 2020). Berdasarkan grafik dan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia mengalami resesi pada Triwulan II tahun 2020 yang dilihat dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3,49 persen apabila dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2019 (Sianturi, 2020).

Penurunan PDB akibat wabah Covid-19 yang menerpa Indonesia pada awal 2020 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ini dapat dirasakan secara langsung, terlihat dari banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan akibat adanya penurunan produksi (Sebastian, 2021). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak tahun 2014 hingga 2018 jumlah PHK di Indonesia terus menurun hingga 95,67 persen. Kemudian pada tahun 2019, jumlah PHK kembali naik menjadi 45.000 orang dan semakin melonjak naik mencapai 3,6 juta orang hingga Juli 2020 (lihat pada gambar 1.2).



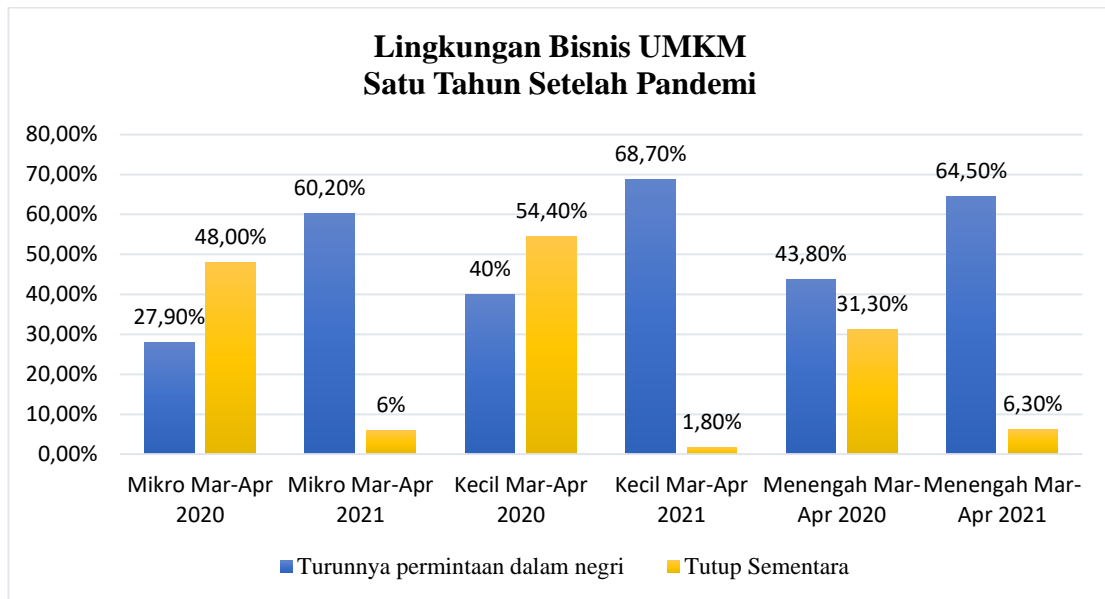
Gambar 1.2 Angka PHK di Indonesia tahun 2014-2020
(<https://lokadata.beritagar.id/>)

Covid-19 tidak hanya memberikan dampak dari sisi total produksi dan nilai perdagangan, namun hingga kepada sisi total sejumlah besar tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian (Alfrian & Pitaloka, 2020). Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap pendapatan meskipun faktanya konsumsi rumah tangga tetap, akan tetapi tidak tumbuh karena semua orang berada di rumah (Putri, 2020). Besarnya daya beli masyarakat menyesuaikan dengan tingkat pendapatan mereka. Jika tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka akan berdampak pada daya beli masyarakat yang tinggi (Zarkasi, 2014). Tingginya angka PHK menyebabkan banyaknya pengangguran dan ketidakmampuan bekerja, maka sudah pasti mempengaruhi pendapatan masyarakat, produksi serta akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Menteri Riset dan Teknologi mengatakan bahwa peningkatan daya beli masyarakat memiliki peran penting

terhadap berjalannya kegiatan UMKM (Herlinawati, 2020). Artinya, dengan angka pengangguran yang tinggi membuat pendapatan masyarakat menurun begitu juga dengan daya belinya terhadap UMKM akan menurun.

Dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM menjadi penyangga ekonomi yang tahan banting terlihat dari bagaimana UMKM dapat bertahan pada saat terjadinya krisis moneter (Saputra & Prihandoko, 2020). Namun nyatanya UMKM tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 terutama bagi pelaku UMKM yang mengandalkan *offline market*. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa sektor UMKM sangat terdampak oleh pandemi, kurang lebih 64 juta UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset. Setidaknya ada lima permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia selama masa pandemi, yakni; menurunnya daya beli masyarakat, adanya hambatan distribusi, sulitnya mengakses permodalan dan pembiayaan, kesulitan memperoleh bahan baku, dan terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja (Catriana, 2021).

Shinozaki (2021) memaparkan perkembangan UMKM selama pandemi Covid-19 satu tahun belakang, berdasarkan data dari Development Bank Tahun 2021 yang dapat dilihat pada Gambar 1.3 (Shinozaki, 2021).



Gambar 1.3 Lingkungan bisnis UMKM di Indonesia
(<https://www.adb.org>)

Pada usaha mikro, terjadi penurunan permintaan yang lebih besar, dari yang sebelumnya hanya 27,9 persen menjadi 60,2 persen. Akan tetapi persentase usaha mikro yang melakukan penutupan usaha sementara mengalami penurunan, dari 48 persen menjadi hanya 6 persen. Lalu pada usaha kecil, penurunan permintaan juga mengalami kenaikan, yakni dari yang sebelumnya hanya 40 persen menjadi 68,7 persen. Sedangkan usaha kecil yang melakukan penutupan usaha sementara menurun, dari 54,4 persen menjadi 1,8 persen. Kemudian pada usaha menengah, penurunan permintaan naik dari 43,8 persen menjadi 64,5 persen dan usaha menengah yang melakukan penutupan usahanya sementara mengalami penurunan dari yang sebelumnya 31,3 persen menjadi 6,3 persen. Terlihat bahwa banyak UMKM yang mengalami penurunan permintaan dari konsumen dalam negeri sehingga memberikan dampak terhadap pemasukan, yang kemudian membuat banyak pemilik UMKM menutup usahanya sementara waktu untuk menekan kerugian yang dialami usahanya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei tentang kajian cepat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 1 – 20 Mei 2020, dengan melibatkan 679 valid responden yang memiliki mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa selama pandemi, sebanyak 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020). Total UMKM yang terdapat di Kota Batam saat ini sebanyak 81.575 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022). Setidaknya ada 1.900 UMKM di Kota Batam yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat dampak dari Covid-19 (Asrul, 2020). Berdasarkan dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, ada sebanyak 1.305 pelaku UMKM mengalami gulung tikar dan sebagian lainnya melakukan pengurangan karyawan serta kesulitan mendapatkan bahan baku (Sianturi, 2020).

Melihat dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia ini, membuat pemerintah mengeluarkan regulasi sebagai antisipasi terhadap risiko ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Peraturan.bpk.go.id., 2019). Dalam Perppu ini terdapat, 5 poin yang salah satu poinnya mengatur tentang pemberian stimulus ekonomi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meski pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM, masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penghambat bagi UMKM untuk berkembang kembali di masa pandemi. Faktor yang dimaksudkan seperti masih rendahnya daya beli masyarakat dan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kejijakan PPKM ini menyebabkan lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia melakukan penutupan usahanya baik secara permanen ataupun yang dilakukan sementara (Maesaroh, 2021).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana bidang Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, 2017). Dinas koperasi dan usaha mikro bertugas untuk: (1) mengelola administrasi keuangan, (2) mengkoordinasikan susunan program, (3) mengolah data serta informasi UMKM, (4) memberikan fasilitas pembiayaan dan (5) memberikan penyuluhan beserta pelatihan kepada masyarakat (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022). Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dibutuhkan peran dari pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi kembali melalui kegiatan UMKM yang sempat melesu akibat terpaan pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa **“Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam”** sehingga kegiatan UMKM sehingga dapat pulih serta bangkit kembali ditengah pandemi Covid-19 ataupun pasca pandemi yang terjadi saat ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka identifikasi masalah yang didapatkan yakni, terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam banyak sektor salah satunya pada sektor ekonomi. Meski dikatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan perekonomian yang tahan banting, namun pada kenyataannya kegiatan UMKM sempat goyah akibat dari diberlakukannya pembatasan beberapa waktu lalu. Hal ini memberikan dampak pada penurunan produksi dan penjualan hingga mengakibatkan terjadinya pengurangan karyawan dan pemberhentian produksi sementara waktu oleh pengusaha UMKM Kota Batam selama awal masa pandemi.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah di dalamnya, peneliti berfokus pada peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menangani dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam Tahun 2020-2021. Adapun UMKM yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah, terbatas pada UMKM Kota Batam yang terkena dampak Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pokok penelitian ini dilakukan terhadap Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam. Dari pokok penelitian ini, kemudian peneliti menarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang Kebijakan dan Pelayanan Publik dalam sektor UMKM.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Di Kota Batam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pandemi Covid-19 di Indonesia

Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar menjadi pandemi pada tahun 2020. *Coronavirus* menurut *World Health Organization* (WHO) dapat menjadi penyebab penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari penyakit yang ringan seperti flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (World Health Organization, 2022). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 ini, menyebabkan penyakit Covid-19. Hanya dalam waktu beberapa bulan, penularan virus ini terjadi dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, yang kemudian wabah Covid-19 ini diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada 12 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan permasalahan yang besar pada berbagai bidang, seperti kesehatan, sosial, pendidikan, serta perekonomian. UMKM sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia, mengalami guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 (Thaha, 2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan penghentian aktifitas perekonomian secara tiba-tiba untuk sementara waktu, hal ini menyebabkan gangguan pada rantai pasokan di seluruh dunia. Selama periode tertentu, terutama pada saat tingginya kasus Covid-19, mengharuskan banyak usaha untuk melakukan penutupan usaha sementara,

penutupan permanen akibat kerugian yang besar hingga berdampak pada pengurangan karyawan. Dengan adanya kebijakan pemerintah yakni pembatasan berkegiatan dengan menerapkan *Social Distancing* atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengharuskan masyarakat agar membatasi kegiatan yang dilakukan diluar rumah serta menerapkan kebijakan Gerakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, melakukan jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi.

Pelaksanaan PPKM di masa pandemi memberikan dampak terhadap kegiatan pada sektor perekonomian terutama pada UMKM. Pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan atau resesi sebesar 3,49 persen. Penurunan ini memberikan dampak yang signifikan, terlihat dari banyak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat sebagian besar perusahaan mengalami penurunan produksi. Tingginya angka PHK membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga banyak UMKM yang mengalami penurunan omset dan mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha mandiri produktif yang dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi. Tingkat pendapatan riil per kapita dan kepadatan penduduk merupakan dua unsur yang menentukan ada atau tumbuh dan berkembangnya UMKM. Kedua elemen tersebut berdampak pada proses transformasi UMKM karena memiliki pengaruh langsung baik pada sisi permintaan (*output market*) maupun sisi penawaran (*labor market*) UMKM.

Pengertian UMKM dalam Undang Undang, diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pengertian. Ketiga pengertian ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang memiliki pengertian sebagai berikut: (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro; (2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil; dan (3) Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM memiliki asas yang berlandaskan pada kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, kemandirian, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, keseimbangan kemajuan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional, yang mana asas-asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 2. Adapun tujuan dari UMKM dituang pada pasal 3 masih dalam Undang-Undang yang sama, dalam pasal ini disebutkan bahwa “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Selanjutnya, kriteria mengenai UMKM diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dengan kriteria sebagai berikut: Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Absah (2016) adapun manfaat UMKM adalah: (1) membuka lapangan pekerjaan, kehadiran UMKM sangat bermanfaat dalam hal perluasan lapangan pekerjaan masyarakat. Ini bisa menjadi metode untuk mengurangi pengangguran, serta jalan keluar untuk masalah sosial karna

pelaku UMKM dilakukan oleh semua kelas sosial, dari atas hingga bawah; (2) memberikan nilai sumbangan terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana saat ini Indonesia merupakan salah satu dari anggota negara-negara G20, kelompok 20 negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi dunia. PDB adalah statistik makroekonomi yang menunjukkan kemampuan dan layanan suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian dimungkinkan untuk menentukan kekuatan ekonomi suatu negara berdasarkan PDB-nya. Dalam hal ini UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia; dan (3) menjadi salah satu solusi yang efektif terhadap masalah yang terjadi pada perekonomian masyarakat kelas kecil dan menengah, dengan manfaat kewirausahaan yang menyatakan bahwa ekonomi akan tumbuh dan berkembang sebagai hasil inovasi dalam proses manufaktur (Absah, 2016). Inovasi jenis ini hanya dapat dilakukan wirausahawan, karena wirausahawan adalah pelaku keuangan yang mengubah sesuatu dari tidak berguna menjadi berharga. Semakin besar tingkat kewirausahaan, semakin besar pula jawaban atas tantangan ekonomi negara baik dari sisi penerimaan negara hingga lapangan kerja, keduanya positif.

Sebagai unit usaha yang mandiri, peluang pada UMKM memungkinkan banyak orang di kelas menengah ke bawah untuk berpikir secara imajinatif untuk memulai bisnis tanpa membutuhkan modal dalam jumlah besar. Dengan demikian para pengusaha akan semakin terdorong

untuk menciptakan manufaktur dan pasar sasaran yang sebelumnya belum tersentuh oleh bisnis besar.

2.2.2 UMKM di Kota Batam

Sebagai unit usaha mandiri produktif, UMKM dapat dijalankan oleh perorangan atau pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi. Sektor UMKM merupakan pendukung utama terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam ketika sedang terjadi penurunan pada sektor industri. Kota Batam mengandalkan UMKM pada sektor pariwisata untuk memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM memberikan peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat, karena perputarannya yang cepat dan cukup stabil. Pada tahun 2019, Kota Batam setidaknya memiliki 81.468 pelaku UMKM yang terdiri dari semua jenis UMKM. Namun, sampai tahun 2021 hanya sebanyak 738 UMKM yang terdaftar menjadi UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. UMKM binaan ini kemudian dikategorikan menjadi 3, yakni kerajinan, kuliner dan jasa (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2022).

Pemerintah Kota Batam bersama Bank Indonesia, juga melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama pada pemberian fasilitas. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat menghasilkan produk-produk berkualitas yang bernilai jual ekspor. Sebagai upaya memperluas jangkauan produknya, UMKM Kota Batam gencar melakukan promosi produk melalui pameran atau *exhibitions* baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Diadakannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas

BBI) bertemakan *Expanding to the New Market, Recover Together, Recover Stronger* dengan mengung *tagline* UKM Kepri *#WithoutBorder* pada 30 Maret – 3 April 2022, pameran ini diikuti oleh 250 UMKM Kota Batam yang mana 46 UMKM merupakan hasil kurasi KemenkopUKM, sebanyak 132 UMKM terfasilitasi Bank Indonesia, dan 72 UMKM berasal dari pasar rakyat atau bazar kuliner (Gunawan, 2022). Melalui Gernas BBI ini, diharapkan UMKM Kota Batam dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mempromosikan produk buatannya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM Batam, dilakukan kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dan Badan Ekonomi Kreatif.

Melihat banyaknya UMKM yang dimiliki Kota Batam dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah mendukung penuh pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas serta bekerjasama dengan berbagai pihak. Melalui kerjasama dan fasilitas yang diberikan, diharapkan UMKM Batam dapat berkembang dan menghasilkan produk yang berkualitas.

2.3 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Ketahanan UMKM

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, peran dapat dikatakan sebagai suatu perilaku atau sikap yang diharapkan oleh orang banyak (dalam hal ini masyarakat) untuk dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Istilah peran sering digunakan untuk mendefinisikan posisi ataupun

kedudukan seseorang. Peran dikatakan sebagai landasan persepsi bagi setiap orang yang berinteraksi dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban (Madyarti et al., 2021).

Hal senada juga yang dikatakan oleh Soekanto (2015), yang mengatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2015). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Kemudian, peran juga dapat dikatakan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang dalam posisi tertentu (Ritzer, 2014). Sekelompok peran disebut sebagai perangkat peran, yakni kelengkapan hubungan berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki orang sebagai akibat dari memegang status sosial tertentu.

Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok untuk menjalankan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menanggapi harapan masyarakat. Setiap orang memiliki beragam peran yang muncul dari pola kehidupan sosialnya. Ini juga berarti bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang apa yang ditawarkan komunitas kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut, peran dipahami sebagai penilaian derajat fungsi atau keikutsertaan seseorang dalam mendukung pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, atau ukuran hubungan antara dua variabel yang membentuk sebab akibat.

Terdapat tiga hal yang dicakup dalam peranan, yaitu: (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam

masyarakat. Norma yang dimaksudkan yakni merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; (2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan (3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap individu atau kelompok dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sesuai dengan norma yang berkaitan dengan kedudukan koperasi dan UMKM dalam masyarakat. Dengan kata lain, lembaga ini memainkan peran yang didasarkan pada peraturan yang menjadi pedoman dalam proses pengembangan masyarakat.

Peran menentukan apa yang harus diperbuat dan diberikan menyesuaikan dengan perilakunya. Sehingga peranan serta kedudukan suatu hal yang tidak terpisahkan, tanpa adanya peran maka tidak ada kedudukan, begitu sebaliknya. Terdapat beberapa unsur peran yang disebutkan oleh Umar (2017), yang mana peran memiliki beberapa unsur yakni : (1) Peran yang Ideal (*ideal role*) peran ideal merupakan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut Peranan yang secara nyata dilakukan oleh pemegang kekuasaan misal Kepala Dinas Koperasi dan UKM melakukan perannya dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kerayakatan; (2) Peran yang seharusnya (*expected role*) peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat; dan (3) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual Role*) peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata (Umar, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisikan Tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata dan akan bertanggungjawab kepada daerah. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki oleh daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Meski demikian, dalam menentukan kewenangnya berlaku teori residu, yakni kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi enam kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Tugas pemerintah dalam masyarakat adalah membimbing masyarakat agar mandiri dan tumbuh untuk tujuan menghasilkan kesejahteraan, maka dari itu diperlukan adanya peran pemerintah secara optimal dan mendalam dengan tujuan membangun masyarakat (Iyas, 2014). Peran pemerintah yang dimaksud antara lain: (1) Pemerintah sebagai Regulator, pemerintah berperan untuk mengarahkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan. Masyarakat diberikan acuan dasar oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan pelaksanaan pemberdayaan; (2)

Pemerintah sebagai Dinamisator, jika ada hambatan dalam proses pembangunan, pemerintah dapat memobilisasi keterlibatan masyarakat untuk merangsang dan melestarikan dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam masyarakat melalui pemberian insentif serta kepemimpinan dan arahan yang efektif. Biasanya, instruksi diberikan oleh tim penyuluh atau melalui entitas tertentu yang memberikan pelatihan; dan (3) Pemerintah sebagai Fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan guna menjembatani berbagai jenis kepentingan masyarakat dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah terlibat dalam pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, serta pembiayaan atau permodalan melalui pemberian dukungan permodalan kepada masyarakat yang berdaya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor Usaha Mikro di Kota Batam. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan yang berperan sebagai pemeran utama dalam penanganan dampak pandemi pada UMKM Kota Batam.

Menurut Gede Diva (2009) dalam Nawangsari (2021) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator (Diva, 2009; Nawangsari et al., 2021). Adapun ketiga peran ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Fasilitator, Pemerintah sebagai fasilitator berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yakni dengan menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
- b) Regulator, Pemerintah sebagai regulator berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, masyarakat diberikan instrumen berupa acuan dasar agar segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dapat diatur oleh pemerintah.
- c) Katalisator, Pemerintah sebagai katalisator berperan sebagai agen yang menunjang percepatan pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian dapat menjadi model sosial untuk membangun partisipasi masyarakat.

Dikutip dari Arif (2012) dalam Firdaus (2020) sebagai regulator, peran pemerintah adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan mengeluarkan regulasi agar pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan tertib (Arif, 2012; Firdaus, 2020). Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam melaksanakan pembangunan yang kondusif sehingga dapat menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan masyarakat agar pembangunan daerah dapat optimal (Firdaus, 2020). Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator memberikan pendampingan melalui pendidikan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan, hingga pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Selanjutnya sebagai katalisator, Nirwana dkk (2017) menyatakan

bahwa pemerintah cenderung berperan kepada bagaimana informasi disampaikan dengan komprehensif mengenai suatu persoalan yang sedang menjadi fokus, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Nirwana et al., 2017).

Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat ataupun pendukung dalam menjalankan perannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keoptimalan peran pemerintah yakni, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, dan partisipasi dari masyarakat (Suhroh, 2021). Adapun keempat faktor ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana, dengan adanya sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah dalam rangka merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar pemerintah, dengan sarana dan prasarana yang terpenuhi mampu mempermudah pemerintah untuk dapat mengimplementasikan program yang telah direncanakan.
- b) Ketersediaan anggaran, sebagai sumber finansial dari pemerintah, adanya anggaran dana menjadi suatu hal yang penting karena dapat memberikan motivasi kepada pegawai, sarana pengembalian standar ukuran kinerja yang mampu dijadikan sebagai evaluasi, serta berfungsi sebagai koordinator seluruh unit kerja dalam aktivitas pemerintahan.
- c) Kemitraan, *Good governance* memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*, ketiga prinsip ini mendasari pola hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini

membentuk kemitraan yang baik dan harmonis sehingga dapat menciptakan suasana pemerintahan yang baik (*good governance*).

- d) Partisipasi dari masyarakat, masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran penting yang mampu mengoptimalkan peran pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan definisi di atas, pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem pemerintahan. Pemerintah daerah mengacu pada kekuasaan administratif di wilayah yang lebih kecil dari suatu negara, sedangkan negara bagian Indonesia adalah negara yang dibagi menjadi Provinsi. Provinsi ini dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah memiliki tugas serta peran yang penting dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan perannya, tentu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari kinerja pemerintah daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdurrahman Firdaus Thaha (2020)	Dampak Covid-19 terhadap UMKM Di Indonesia	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> Sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi

				<ul style="list-style-type: none"> • 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, • 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, • 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, • 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah • Pemerintah mendukung bisnis UMKM dengan mengeluarkan kebijakan yang dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah dan panjang, UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen <i>business cycle</i> dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis, yakni; Puncak Siklus (Kemakmuran), Resesi (Kemerotan), Palung (Depresi Paling Parah), Pemulihan (Ekspansi)
2.	Zeinab Abbas Zaazou, Doaa Salman Abdou (2020)	<i>Egyptian small and medium sized enterprises' battle against COVID-19 pandemic:</i>	Kualitatif dan Kuantitatif - Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • ada sektor yang diuntungkan dari wabah virus corona • pemerintah memberikan dukungan keuangan

		<i>March–July 2020</i>		<p>dan teknis, namun sebagian besar perusahaan yang diwawancarai menolak</p> <ul style="list-style-type: none"> • banyak responden yang setuju bahwa keputusan pemerintah tentang penutupan sebagian perusahaan industri dan komersial tidak menguntungkan • pengusaha yang menganut budaya fleksibel dan fokus pada investasi baru dalam inovasi, berhasil menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan berhasil bertahan di pasar.
3.	Aeroen Safis Kharisman, Muhammad Eko Atmojo (2021)	Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 dapat dikatakan cukup responsive • Dari tiga aspek yang menjadi penilaian, dua diantaranya sudah dijalankan dengan baik • Kebijakan, program serta kegiatan yang dijalankan sesuai dengan permasalahan yang dialami UMKM yang terdampak pandemi Covid-19
4.	Aziza Nur Auliya dan Lukman Arif (2021)	Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Peran fasilitator, regulator dan kasalitor sudah

		Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik		dilaksanakan dengan baik <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperindag telah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat guna membantu para pelaku Usaha Mikro agar dapat bertahan selama pandemi ini berlangsung.
5.	Ertien Rining Nawangsari, Eva Yulia Fridayanti, Aktivani Inas Almira, dan Riyaya Hajja Nugrohowati (2021)	Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban.	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator, regulator dan kasalitor dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh daerah Tuban
6.	Ika Masruroh, Rizky Andean, dan Frieda Arifah (2021)	Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah berupaya mengatasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial. • Hal ini tentu ditujukan untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM di Indonesia.
7.	Lailatus Suhroh (2021)	Peran Pemerintah Desa Ko ' olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya masih terdapat 4 faktor yang perlu untuk lebih diperhatikan agar dapat memaksimalkan peran pemerintah dalam upayanya menekan stunting. Adapun keempat

		Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan		faktor tersebut ialah ketersediaan sarana dan prasarana, anggaran, faktor kemitraan dan partisipasi masyarakat.
8.	Nadia Fitri Wijayaningsih, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, Lubna Salsabila (2021)	Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Kualitatif Eksploratif	<ul style="list-style-type: none"> • Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif terlebih bahwa dalam penyaluran bantuan belum menggunakan kriteria status dari pelaku usaha pengusul. • Perlu ada dalam pemahaman aparatur dan arahan dari kabupaten terhadap penyelenggaraan dan penyaluran Banpres kepada pelaku UMKM
9.	Wina Aprillia dan Sri Sudiarti (2022)	Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemberdayaan UKM berjalan dengan baik dan efektif. • Faktor pendukung adalah dapat dimanfaatkannya teknologi <i>e-bussiness</i> dan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak terkait. • Faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan anggaran yang dimiliki, sulitnya mendapat permodalan usaha kecil menengah, dan beberapa permasalahan teknis oleh pelaku UKM.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Abdurrahman Firdaus Thaha (2020) dalam *Jurnal Brand* Vol.2 (1) E-ISSN 2715-4920 dengan judul *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 37.000 UMKM sangat terdampak pandemi dan telah melakukan pelaporan. Dampak yang ditimbulkan bermacam-macam yang kemudian dikelompokkan menjadi 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan sebanyak 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Pemerintah mendukung bisnis UMKM dengan mengeluarkan kebijakan yang dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek yakni dengan berfokus pada mengurangi bertambahnya korban Covid-19 dengan memperhatikan pekerja dan industri, jangka menengah yakni dengan memastikan dunia usaha terus beroperasi serta menjaga kesinambungan sektor logistik dan jangka panjang dengan memberikan dorongan kepada UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi mulai dari proses produksi, promosi hingga menemukan pasar yang potensial.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Zeinab Abbas Zaazou dan Doaa Salman Abdou (2020) dalam *Journal of Humanities and Applied Social Sciences* Vol.4 (2) DOI 10.1108/JHASS-09-2020-0161 dengan judul *Egyptian small and medium sized enterprises' battle against COVID-19 pandemic: March–July 2020*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, hasil yang didapatkan

dari penelitian ini: ada sektor yang diuntungkan dari wabah virus corona; pemerintah memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada usaha yang terdampak, namun sebagian besar perusahaan yang diwawancarai menolak untuk menerimanya; banyak responden yang setuju bahwa keputusan pemerintah tentang penutupan sebagian perusahaan industri dan komersial tidak menguntungkan; pengusaha yang menganut budaya fleksibel dan fokus pada investasi baru dalam inovasi, berhasil menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan berhasil bertahan di pasar.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Aeroen Safis Kharisman, Muhammad Eko Atmojo (2021) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.9 (2) E-ISSN 2654-5020 dengan judul Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 dapat dikatakan cukup responsif hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pendataan kepada UMKM yang terdampak; dari tiga aspek yang menjadi penilaian, dua diantaranya sudah dijalankan dengan baik yakni aspek sikap Dinas KUMKP dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dan penggunaan aspirasi UMKM sebagai referensi membuat kebijakan; program serta kegiatan yang dijalankan sesuai dengan permasalahan yang dialami UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Aziza Nur Auliya dan Lukman Arif (2021) dalam Jurnal Reformasi Administrasi Vol.8 (1) E-ISSN 2622-8696 dengan

judul Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peran fasilitator, regulator dan kasalitor yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik khususnya Usaha Mikro di Kecamatan Manyar sudah dilaksanakan dengan baik. Dinas Koperindag telah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat guna membantu para pelaku Usaha Mikro agar dapat bertahan selama pandemi ini berlangsung.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari, Eva Yulia Fridayanti, Aktivani Inas Almira, dan Riyaya Hajja Nugrohowati (2021) dalam Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol.5 (2) E-ISSN 2598-6236 yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator, regulator dan kasalitor dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh daerah Tuban.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Ika Masruroh, Rizky Andrian, dan Frieda Arifah (2021) dalam *Journal of Innovation and Knowledge* Vol.1 (1) E-ISSN 2798-3641 dengan judul Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini Pemerintah berupaya

mengatasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial. Hal ini tentu ditujukan untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM di Indonesia.

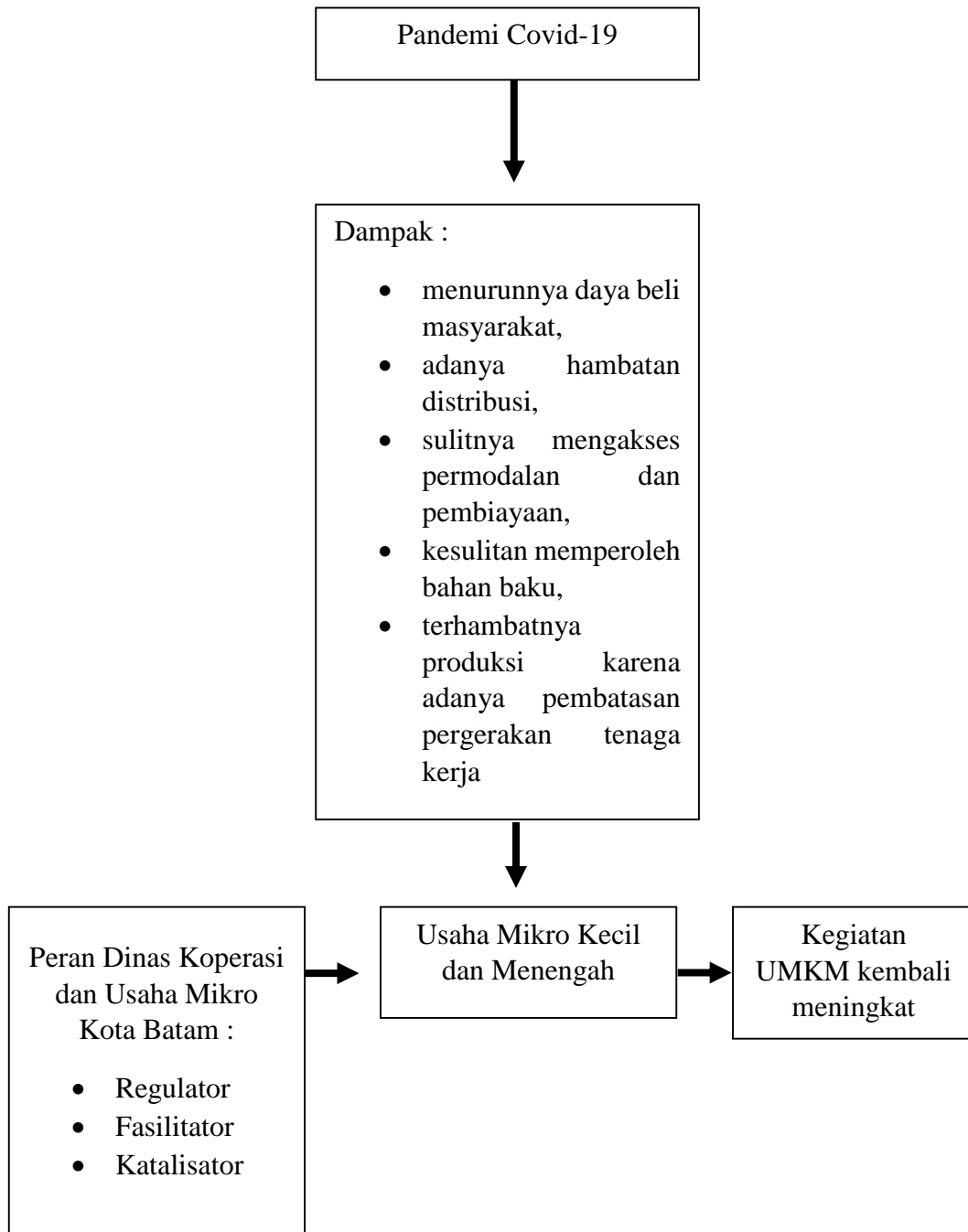
Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Lailatus Suhroh (2021) dalam Jurnal Publika Vol. 9 (1) dengan judul Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk sarana dan prasarana, pemerintah Desa Ko'olan menyediakan 3 unit *Handy Talky*, peralatan imunisasi, PMT Gizi, timbangan serta kebutuhan lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga sudah menyediakan satu pos kesehatan desa yang digunakan sebagai posyandu. Dari segi anggaran, pemerintah tidak menyiapkan anggaran khusus. Dalam hal kemitraan, pemerintah Desa Ko'olan sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dan terakhir, untuk partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Ko'olan hendaknya semakin gencar untuk melakukan sosialisasi.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Nadia Fitri Wijayaningsih, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, Lubna Salsabila dalam Jurnal Wacana Kinerja Vol.24 (2) E-ISSN 2620-9063 dengan judul Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif terlebih

bahwa dalam penyaluran bantuan belum menggunakan kriteria status dari pelaku usaha pengusul, dengan demikian diperlukan adanya pemahaman oleh aparatur dan arahan dari kabupaten terhadap penyelenggaraan dan penyaluran Banpres kepada pelaku UMKM.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Wina Aprillia dan Sri Sudiarti (2022) dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Vol.3 (2) E-ISSN 2798-0502 dengan judul Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara). Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya – upaya, seperti pembinaan sumber daya manusia (SDM), bantuan dalam mengakses permodalan, mengembangkan relasi kerjasama pada usaha kecil menengah (UKM) dan mengenalkan produk – produk usaha kecil menengah (UKM) melalui kegiatan pameran dan promosi. Yang menjadi factor pendukung adalah dapat dimanfaatkannya teknologi e-bussiness dan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak terkait. Kemudian, untuk factor penghambatnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan anggaran yang dimiliki, sulitnya mendapat permodalan usaha kecil menengah, dan beberapa permasalahan teknis oleh pelaku UKM.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dibuat dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2017) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi oleh peneliti. Data dari penelitian ini kemudian akan disajikan dalam bentuk teks yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan atas persetujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Data kualitatif yang disajikan pada penelitian ini merupakan data terkait mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam.

3.2 Sifat Penelitian

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2017) adalah metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya

pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran hubungan antar variabel dan juga menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan deskripsi mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang berlokasi di Jl. Pramuka no.1 – Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29424 dan beberapa lokasi usaha UMKM di Kota Batam. Dipilihnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini dikarenakan Dinas tersebut menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang UMKM di daerah, yang mana merupakan objek penelitian yang akan difokuskan oleh peneliti.

3.3.2 Periode Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, dengan 3 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Adapun periode penelitian ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Periode Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Maret 2022			April 2022			Mei 2022			Juni 2022			Juli 2022			
1	Studi Pustaka	■	■	■													
2	Penyusunan Proposal	■	■	■													
3	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Analisis Hasil Penelitian												■	■	■	■	■
5	Penyusunan Laporan												■	■	■	■	■
6	Penyerahan																■

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) data primer merupakan data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara dan hasil observasi lapangan dengan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta beberapa pelaku UMKM Kota Batam.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder merupakan data penelitian yang sumbernya didapatkan secara tidak langsung, data ini diperoleh peneliti melalui media perantara yakni diberikan dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2015). Data sekunder didapatkan melalui literatur, jurnal, artikel, atau melalui situs di internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yakni mengenai mengenai peran yang diambil oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan penanganan terhadap dampak Covid-19 bagi

UMKM di Kota Batam, dan juga Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2016 – 2021.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan *Field Research*, yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2015). Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Menurut Eserberg (dalam Sugiyono, 2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh data melalui tanya jawab dengan informan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM Kota Batam. Adapun daftar informan yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro	1
2	Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan & Data Usaha Mikro	1
3	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro	1
4	Konsultan PLUT-KUMKM Bidang SDM	1
5	Pendamping UMKM Kota Batam	1
6	Pelaku UMKM Kota Batam	5

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiono (2015) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau juga karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, metode dokumentasi diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari data-data yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian, dokumentasi dilakukan pada topik yang terkait penelitian mengenai peran yang diambil oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan penanganan terhadap dampak Covid-19 bagi UMKM di Kota Batam.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015), analisis data dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses dari kegiatan merangkum, memisahkan data dari lapangan karena jumlahnya yang banyak, mencari hal-hal yang relevan, serta mencari substansi dari temuan data. Untuk memperoleh data yang tepat dan dapat diandalkan untuk penelitian ini, maka dari itu peneliti akan melakukan penyelidikan yang mendalam.

b) Penyajian Data

Data dapat ditampilkan dalam berbagai format pada tahapan ini, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan lainnya. Tujuan penyajian data ini

adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang ada dan menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

c) Penggambaran Kesimpulan

Setelah menyelesaikan tahapan sebelumnya, peneliti dapat membuat kesimpulan mengenai masalah yang telah diteliti. Dengan menarik kesimpulan dari data studi, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang ada dan membuat kesimpulan dengan lebih mudah.

